ARTI SIFAT KELMUAN ANTROPOLOGI HUKUM PADA MASA SAAT INI

GANEF HARIWARSONO

Email: ganephariwarsono@gmail.com

No BP: 1710003600048

UNIVERSITAS EKASAKTI

A. PENDAHULUAN

Antropologi secara etimologis berasal dari bahasa Yunani, kata *Anthropos* berarti manusia dan *logos* berarti Ilmu, Jadi dapat disimpulkan ilmu yang mempelajari manusia . oleh karena itu antropologi didasarkan pada kemajuan yang telah dicapai ilmu pengetahuan. Menurut kamus Oxford, antropologi adalah studi tentang masyarakat dan budaya manusia beserta perkembangannya. Dapat diartikan studi tentang karakteristik biologis dan fisiologis manusia dan evolusinya

David E. Hunter dalam *The Study of Anthropology* (1975) menjelaskan, antropologi adalah suatu ilmu pengetahuan yang lahir dari adanya keingintahuan yang tidak terbatas tentang umat manusia. William A. Haviland dalam *Cultural Anthropology* (1976), antropologi adalah ilmu yang mempelajari tentang umat manusia secara umum dengan mempelajari warna fisik, bentuk fisik dan kebudayaan yang dihasilkan oleh masyarakat

Menurut pendapat Rouceke dan Warren yang mengatakan bahwa Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan manusia dengan kelompok-kelompok, berdasarkan uraian itu ilmu sosiologi mengobjekkan pada suatu masyarakat sebagai ilmu yang berdiri sendiri karena memiliki unsure ilmu pengetahuan. Sedangkan dalam Ilmu Antropologi Hukum mempelajari tentang peran, Status atau kedudukan, Nilai, Norma dan Budaya serta Kedudukannya. Kesemuanya ini

merupakan hal-hal yang sangat erat kaitanya dengan ilmu antropologi hukum, sehingga dapat kita simpulkan bahwa Ilmu Antropologi Hukum merupakan ilmu yang mempelajari hubungan manusia dengan kebudayaannya yang terkhusus di bidang hukum, atau ilmu tentang manusia dalam kaidah-kaidah sosial yang bersifat hukum, dengan kekuasaannya digunakan oleh penguasa untuk mengatur masyarakat agar tidak mekanggar kaidah-kaidah sosial yang telah ada didalam suatu masyarakat. Antropologi hukum adalah salah satu ilmu yang mempelajari kekhasana bentuk hukum aktivitas manusia dalam periode sejarah yang berbeda dan dalam keadaan yang sama sekali berbeda

B. PEMBAHASAN

Antropologi adalah ilmu yang mempelajari tentang manusia. Menurut Hilman Hadikusuma, antropologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari manusia, baik dari segi hayati maupun dari segi budaya. Sasaran pokok dari antropologi adalah manusia, dan kemudian perilaku kebudayaanya. Antropologi melihat hukum hanya sebagai aspek dari kebudayaan, yaitu suatu aspek yang digunakan oleh kekuasaan masyarakat yang teratur dalam mengatur perilaku dan masyarakat, agar tidak terjadi penyimpangan dan penimpangan yang terjadi dari norma-norma sosial yang ditentukan dapat di perbaiki.

Antropologi hukum merupakan cabang ilmu pengetahuan hukum yang mempelajari pola-pola sengketa dan penyelesaiannya, baik pada masyarakat yang sederhana maupun pada masyarakat yang mengalami modernisasi. Batasan ini dikemukakan oleh Paul Bohana. Menurut J.B.Daliyo dkk antropologi hukam adalah antropologi yang mempelajari hukum sebagai salah satu aspek kebudayaan, kemudin menurut William Nixon (1998), Antropologi hukum adalah bidang kajiam yang mencoba menjelaskan keteraturan didalam masyarakat, hukum dipandang

sebagai komponen penting dalam kebudayaan. Menurut T.O. Ihromi, Antropologi hukum mengkaji hukum sebagai bagian dari kebudayaan yang berfungsi sebagai pedoman berperilaku dan pengendalian sosial.

Dalam konteks pedoman berlaku, hukum dilihat sebagai seperangkat peraturan yang mengatur/memberikan pedoman bagaimana anggota masyarakat bertingkah laku. Sedangkan dalam konteks pengendalian Sosial, hukum terlebih dahulu melalui suatu proses pengajaran. Yang diajarkan adalah nilai-nilai atau norma-norma sosial. Norma-norma sosial itu diinternalisasikan sehingga menjadi bagian dari kepribadian dan perilaku anggota masyarakat yang memang diharapkan oleh masyarakat yang bersangkutan. Proses tersebut tidak selalu berjalan lancar, dapat juga terjadi pengingkaran norma. Peningkatan/pelanggaran norma yang dianggap ringan masih diganjar dengan teguran atau bujukan. Sedangkan pengingkaran/penggarana yang dianggap berat akan mendapatkan hukuman/sanksi yang keras pula. Pandangan mengenai hukum sebagai proses dianut oleh Laura Nader.

Dalam perspektif antropologi, hukum adalah bagian integral dari kebudayaan secara keseluruhan, dan arena itu hukum dipelajari sebagai produk dari interaksi sosial yang dipengaruhi oleh aspek-aspek kebudayaan yang lain, seperti politik, ekonom, ideologi, religi, dan lain-lain. Disisi lain hukum juga dipelajari sebagai proses sosial yang berlangsung dalam kehidupan masyarakat. Secara empiris dapat dijelaskan bahwa hukum yang berlaku dalam masyarakat selain terwujud dalam bentuk perundang-undangan (hukum positif), juga berwujud sebagai hukum agama dan hukum adat. Tetapi, secara antropologis bentuk mekanisme-mekanisme pengaturan sendiri dalam komunitas-komunitas masyarakat adalah juga merupakan hukum yang secara lokal berfungsi sebagai sarana untuk menjaga keteraturan sosial.

Implementasi antropologi hukum dalam penelitian memerlukan berbagai pendekatan atau metode, seperti metode historis, normative, eksploratif, deskriptif, perilaku, dan studi kasus. Dengan demikian antropologi hukum memiliki urgensi untuk menjelaskan evolusi hukum dalam masyarakat, menemukan ideologi dalam sebuah aturan hukum, mempelajari perilaku manusia dan budaya hukumnya, serta meneliti secara induktif kasus-kasus perselisihan hukum dalam masyarakat.

Penerapan disiplin keilmuan ini akan membantu mengungkapkan budaya hukum masyarakat yang merupakan manifestasi dari penerimaan atau penolakan terhadap aturan hukum. Sistem hukum yang berlaku dianggap sebagai bentuk simbiosis antara manusia, masyarakat, kekuasaan, dan aturan-aturan. Hukum dalam perspektif antropologis merupakan aktifitas kebudayaan yang berfungsi sebagai sarana pengendalian sosial (sosial control), atau sebagai alat untuk menjaga keteraturan sosial (sosial order) dalam masyarakat.

1. Hukum sebagai suatu sistem pada pokoknya mempunyai 3 elemen, yaitu :

- a. Struktur sistem hukum (structure of legal system) yang terdiri dari lembaga pembuat undang-undang (legislatif), institusi pengadilan dan strukturnya, lembaga kejaksaan dengan strukturnya, badan kepolisian Negara, yang berfungsi sebagai aparat penegak hukum;
- b. Substansi sistem hukum (substance of legal system) yang berupa norma-norma hukum, peraturan-peraturan hukum, termasuk pola-pola perilaku masyarakat yang berada di balik sistem hukum;
- c. Budaya hukum masyarakat (legal culture) seperti nilai-nilai, ide-ide, harapan-harapan dan kepercayaan-kepercayaan yang terwujud dalam perilaku masyarakat dalam mempersepsikan hukum.

2. Setiap masyarakat memiliki struktur dan substansi hukum sendiri, yang menentukan apakah substansi dan struktur hukum tersebut ditaati atau sebaliknya juga dilanggar adalah sikap dan perilaku sosial masyarakatnya, dan karena itu untuk memahami apakah hukum itu menjadi efektif atau tidak sangat tergantung pada kebiasaan-kebiasaan (costoms), kultur (culture), tradisi-tradisi (traditions), dan norma-norma (informalnims) yang diciptakan dan dioperasionalkan dalam masyarakat yang bersangkutan.

Beberapa sifat keilmuan dalam antropologi hukum yakni:

1. Antropologi hukum tidak membatasi pandangan ada kebudayaan tertentu (studi perbandingan);
2. Antropologi hukum, mempelajari masyarakat sebagai suatu keseluruhan yang utuh, dimana bagian-bagiannya saling bertautan;
3. Antropologi hukum modern tidak memusatkan perhatian hanya pada kekuatan sosial dan hasil superorganis;
4. Antropologi hukum memandang masyarakat secara dinamis, sehingga peranan sosial dan huku tidak terbatas mempertahankan status quo;
5. Antropologi hukum termasuk ilmu hukum yang empiris.

Melihat kenyataanya pengkajian dalam sifat antropologi hukum dengan memperhatikan arah kecendrungan pada saat ini yang telah memasuki era modernisasi, merupakan saat yang tepat, mengingat keadaan bangsa Indonesia dan melihat arah perkembangan global yang lebih mengarah kepada terbentuknya suatu jejaring dalam berbagai hal termasuk kebudayaan, hukum, sosial dan politik.

Indoensia sebagai bangsa yang majemuk dengan jumlah suku bangsa, bahasa, adat istiadat, kepercayaan dan aturan yang bermacam macam. Kondisi seperti ini sebenarnya menyadarkan

kita bahwa pluralism hukum merupakan suatu keniscayaan yang tak dapat dihindarkan. Upaya unifikasi dan kodifikasi hukum yang telah diupayakan sejak kemerdekaan hingga sekarang belum menemui titik terang. Hal ini dikarenakan para pengambil kebijakan itu telah menafikan realitas atas kemajemukan atau muktikulturalisme yang ada di Indonesia. Dengan mempertimbangkan kondisi Indonesia yang demikian, pendekatan yang cocok digunakan untuk menggali menilai, memahami dan mengevaluasi hukum-hukum yang ada di berbagai daerah Indonesia adalah pendekatan hukum yang bersifat antropologis. Dimana beberapa kata kunci yang musti diwaspadai dalam pendekatan ini, mengingat perkembangan masyarakat yang terjadi akhir-akhir ini berbeda dengan kondisi masyarakat yang terjadi ketika masa terdahulu. Kesempatan untuk mengembangkan kajian hukum dalam perspektif antropologis semakin terbuka lebar dengan muncul nya era modernisasi yang memberikan penghargaan pada particular dan local, sebagai ganti pandangan yang universal dan modernism.

N. Ruoland menyatakan bahwa antropologi kini menjadi nilai-nilai modernitas yang mulai dipertanyakan. Kegemaran berwisata, penyanjungan terhadap keanekaragaman dan jati diri, semuanya menjadi factor utama dan hal lainnya menjadi pendorongnya. Beberapa yuridai kini mulai berpaling kepada antropologi hukum. Tentu karena tertarik yang semakin tidak jelasnya hukum positif yang dapat diselubungi oleh terlalu banyak undang-undang dan figoncangkan oleh perubahan-perubahan pesa dan bertbi-tubi, serta diperburuk oleh redaksinya yang bahasanya sudah menjadi jargon. Etnologi sudah menyadari bahwa setiap penelitian mengenai dunia lain disebabkan oleh rasa jemu terhadap duia yang sudah dikenalnya akrab. Antropologi hukum yang dimaksud untuk memikirkan secara terpadu hukum-hukum semua masyarakat, lebih memberikan ketentramana. Jika ada hari kedepan baginya, tugasya ialah untuk

menyumbang secara menentukan dalam menjadi hukum sebagai ilmu. Yang intinya antropologi hukum membawa akal sehat.da

Dalam istilah *ubi societas, ibi ius* (dimana ada masyarakat disana ada hukum) Antropologi hukum mengajarkan keadaan kita bahwa hukum bukanlah milik khusus masyarakat modern, namun setiap masyarakat mengenal hukum, masing-masing memandangnya secara berbeda-beda, ada sebagian masyarakat yang bahkan tak yakin menyebutnya sebagai hukum. Demikian pula istilah *summum ius, summa iniuria* (hukum paling sempurna adalah ketidakadilan yang paling besar) mengingatkan kepada para pakar antropologi hukum bahwa kita harus menguasai hukum, mempercayakan kepada manusia dan bukan sebaliknya .

Istilah lain yang perlu diingat adalah *suum cuique tribuere* (kepada masing-masing dibagikan bagiannya), jika setiap sistem hukm memang semestinya ditempatkan dalam totalitas kebudayaan dan masyarakatnya, sehingga dengan demikain ditonjolkan sifatnya yang khas, akan menemukan mekanisme-mekanisme umum yang menjalankan kelangsungan ribuan macam hukum yang bekas bekasnya sampai pada kita. beberapa langkah telah telah dicapai dan cukup penting telah dicapai dan cukup penting.

Penekanan pada kajian antropologis hukum dalam melihat hukum dalam suatu masyarakat disebabkan adanya pandangan yang berat sebelah. Antropologi hukum masih dipandang dengan prasangka negatif. Beberapa diantaranya beranggapan secara keliru, bahwa antropologi hukum mengandung resiko terlalu menonjolkan sifat-sifat khas etnis. Padahal kesalahannya terletak pada gilirannya malah membandingkan kembali sifat-sifat khas itu. kenyataan adanya sifat komunal tentu merupakan hal yang esensial tentu merupakan hal yang esensial dalam kehidupan semua masyarakat baik modern maupun tradisional.

C. PENUTUP

Antropologi adalah ilmu yang mempelajari tentang manusia baik dari segi hayati maupun dari segi budaya. Antropologi hukum merupakan cabang ilmu pengetahuan hukum yang mempelajari pola-pola sengketa dan penyelesaiannya, baik pada masyarakat yang sederhana maupun pada masyarakat yang mengalami modernisasi. Antropologi hukum mengkaji hukum sebagai bagian dari kebudayaan yang berfungsi sebagai pedoman berlaun dan pengendalian sosial.hukum adalah bagian integral dari kebudayaan secara keseluruhan, dank arena itu hukum di pelajari sebagai produk dari interaksi sosial yang dipengaruhi oleh aspek-aspek kebudayaan yang lain, seperti politik, ekonomi, ideology, religi, dan lain-lain. Implementasi antropologi hukum dalam penelitian memerlukan berbagai pendekatan atau metode, seperti metode historis, normative, eksploiratif, deskriptif, perilaku, dan studi kasus. Ada tiga elemen dalam hukum sebagai suatu system yaitu Struktur sistem hokum, substansi sistem hokum dan Budaya hukum masyarakat. Indoensia sebagai bangsa yang majemuk dengan jumlah suku bangsa, bahasa, adat istiadat, kepercayaan dan aturan yang bermacam macam, kondisi Indonesia yang demikian, pendekatan yang cocok digunakan untuk menggali menilai, memahami dan mengevaluasi hukum-hukum yang ada di berbagai daerah Indonesia adalah pendekatan hukum yang bersifat antropologis.

DAFTAR PUSTAKA

- Darmini Roza dan Laurensius Arliman S, Peran Pemerintah Daerah Di Dalam Melindungi Hak Anak Di Indonesia, Masalah-
Masalah Hukum, Volume 47, Nomor 1, 2018. <https://doi.org/10.14710/mmh.47.1.2018.10-21>
- Laurensius Arliman S, Peranan Metodologi Penelitian Hukum di Dalam Perkembangan Ilmu Hukum di Indonesia, Soumatera Law Review, Volume 1, Nomor 1, 201. <http://doi.org/10.22216/soumlaw.v1i1.3346>.
- Laurensius Arliman S, Peran Badan Permusyawaratan Desa di Dalam Pembangunan Desa dan Pengawasan Keuangan Desa, Padjadjaran Journal of Law, Volume 4, Nomor 3, 2017. <https://doi.org/10.15408/jch.v4i2.3433>.
- Laurensius Arliman S, Penanaman Modal Asing Di Sumatera Barat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, Supremasi Hukum, Volume 1, Nomor 1, 2018. <http://dx.doi.org/10.36441/hukum.v1i01.102>.
- Laurensius Arliman S, Memperkuat Kearifan Lokal Untuk Menangkal Intoleransi Umat Beragama Di Indonesia, Ensiklopedia of Journal, Volume 1, Nomor 1, 2018, <https://doi.org/10.33559/eoj.v1i1.18>.
- Laurensius Arliman S, Perkawinan Antar Negara Di Indonesia Berdasarkan Hukum Perdata Internasional, Kertha Patrika, Volume 39, Nomor 3, 2017, <https://doi.org/10.24843/KP.2017.v39.i03.p03>.
- Laurensius Arliman S, Partisipasi Masyarakat Di Dalam Pengelolaan Uang Desa Pasca Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Jurnal Arena Hukum, Volume 12, Nomor 2, 2019, <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2019.01202.5>.
- Laurensius Arliman S, Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Baik Di Negara Hukum Indonesia, Dialogica Jurnalica, Volume 11, Nomor 1, 2019, <https://doi.org/10.28932/di.v1i1.1831>.
- Laurensius Arliman S, Mediasi Melalui Pendekatan Mufakat Sebagai Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Untuk Mendukung Pembangunan Ekonomi Nasional, UIR Law Review, Volume 2, Nomor 2, 2018, [https://doi.org/10.25299/uirlrev.2018.vol2\(02\).1587](https://doi.org/10.25299/uirlrev.2018.vol2(02).1587)
- Laurensius Arliman S, Peranan Filsafat Hukum Dalam Perlindungan Hak Anak Yang Berkelanjutan Sebagai Bagian Dari Hak Asasi Manusia, Doctrinal, Volume 1, Nomor 2, 2016.
- Laurensius Arliman S, Ni Putu Eka Dewi, *Protection of Children and Women's Rights in Indonesia through International Regulation Ratification*, Journal of Innovation, Creativity and Change Volume 15, Nomor 6, 2021.
- Laurensius Arliman S, *Gagalnya Perlindungan Anak Sebagai Salah Satu Bagian Dari Hak Asasi Manusia Oleh Orang Tua Ditinjau Dari Mazhab Utilitarianisme*, Jurnal Yuridis, Volume 3, Nomor 2, 2016, <http://dx.doi.org/10.35586/v3i2.180>.
- Laurensius Arliman S, Tantangan Pendidikan Kewarganegaraan Pada Revolusi 4.0, Jurnal Ensiklopedia Sosial Review, Volume 2, Nomor 3, 2020..